**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **1. Latar Belakang**

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimarannu secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan system manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Pasimarannu yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

**1. 2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, disusun atas dasar:

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);

**1. 3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2025-2029 adalah sebagai beikut :

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Pasimarannu yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
2. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2025-2029 adalah :

1. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Camat untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pasimarannu.
2. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Pasimarannu.
3. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pasimarannu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Kecamatan Pasimarannu.

**1. 4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu.

**BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMARANNU**

Memuat tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pasimarannu, sumber daya Kecamatan Pasimarannu, kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu, permasalahan pelayanan Kecamatan Pasimarannu dan isu strategis.

**BAB III** **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029, sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029, strategi Kecamatan Pasimarannu dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029.

**BAB IV** **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Pasimarannu, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

**BAB V** **PENUTUP**

Memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMARANNU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pasimarannu**

Pembentukan kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas dan Fungsi, serta Struktur Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
13. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
14. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
15. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan pelaksanaan tugas camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
8. mengelola administrasi umum;
9. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
10. mengelola administrasi keuangan;
11. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
7. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
8. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
9. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
10. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
11. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
12. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
13. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan;
7. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
8. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
9. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
10. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
11. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
12. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
13. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
14. menyusun neraca keuangan kecamatan;
15. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
16. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
17. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
18. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
19. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
20. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
21. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
11. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
12. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentereman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
11. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
12. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
13. Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, dan perizinan tempat usaha berdasarkan perundang-undangan;
14. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegitan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
8. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
10. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
11. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. Memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekomomian;
14. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
15. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
16. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
17. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
18. Memantau dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
19. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan serta pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
20. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
21. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
22. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
23. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
24. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
26. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

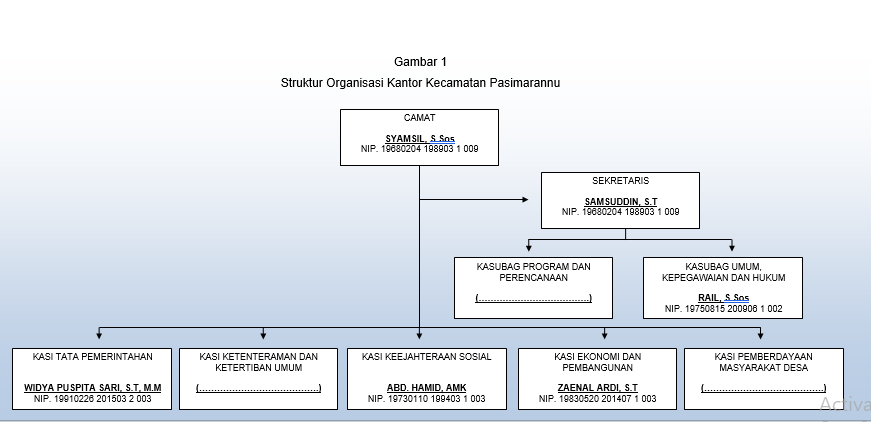
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
8. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
9. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
10. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
11. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
12. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
13. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
14. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
9. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
10. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
12. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

**2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasimarannu**

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimarannu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | PNS | Non PNS | Jumlah |
| 1 | Camat | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | 1 |
| 3 | Kepala Seksi | 3 | - | 3 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 1 | - | 1 |
| 5 | Staf | 4 | 22 | 26 |
| JUMLAH | | 10 | 22 | 32 |

Dari tabel 2.1 di atas dapat digambarkan bahwa komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil jumlah Non Pegawai Negeri Sipil lebih dominan dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Data Pegawai Kecamatan Pasimarannu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | | PROSENTASE | |
| PNS | NON PNS | PNS | NON PNS |
| 1 | S2 | 1 | 0 | 10% | 0% |
| 2 | S1 | 5 | 9 | 50% | 40,90% |
| 3 | D2 | 1 | 1 | 10% | 4,55% |
| 4 | SLTA | 3 | 12 | 30% | 54,55% |
| 5 | SLTP | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6 | SD | 0 | 0 | 0% | 0% |
| JUMLAH | | 10 | 22 | 100% | 100% |

Dari tabel 2.2 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA) yang memiliki prosentase yakni 50% dan 30%. Demikian juga dengan Non PNS, didominasi dengan tingkat pendidikan SLTA dan Srata 1 (S.1) yakni sebanyak 54, 55% dan 40, 90%.

Data PNS menurut golongan ruang dan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Gol. Ruang | Tingkat Pendidikan Formal (orang) | | | | | | | | JML |
| S2 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | IV/b | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | IV/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | III/d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | III/c | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | III/b | -- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | III/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | II/d | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | II/c | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | II/b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | II/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | 10 |

Dari tabel 2.3 di atas, dapat digambarkan bahwa untuk PNS Kecamatan Pasimarannu dilihat dari segi golongan ruang didominasi oleh golongan ruang III/c, yakni sebanyak 3 (tiga) orang.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasimarannu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasimarannu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang Tersedia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Keadaan | | | Jumlah | Keterangan |
| B | RR | RB |
| 1 | Tanah Lokasi Perkantoran | 1 | - | - | 1 Unit | Kantor |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | - | - | 1 Unit | Kantor |
| 3 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | - | 1 | 1 Unit |  |
| 4 | Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen | - | - | 1 | 1 Unit |  |
| 5 | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) | - | - | 1 | 1 Unit |  |
| 6 | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst) | - | 1 | - | 1 Unit | Kantor |
| 7 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 8 | Rumah Negara Gol II Lain-lain | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 9 | Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 10 | Tugu Peringatan Lainnya | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 11 | Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 12 | Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst) | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 13 | mesin proses apung lainnya (dst) | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 14 | Pompa Air | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 15 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | - | - | 1 Unit |  |
| 16 | Sepeda Motor | 6 | - | 4 | 10 Unit |  |
| 17 | alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst) | - | - | 2 | 2 Unit |  |
| 18 | Mesin Perekam Stensil Folio | - | - | 1 | 1 Unit |  |
| 19 | Lemari Kayu | 2 | - | - | 2 Buah |  |
| 20 | Lemari Kaca | 1 | - | - | 1 Buah |  |
| 21 | Lemari Makan | 1 | - | - | 1 Buah |  |
| 22 | Alat Kantor Lainnya | 1 | - | 1 | 2 Unit |  |
| 23 | Meja Kerja Kayu | 6 | - | - | 6 Buah |  |
| 24 | Meja Rapat | 2 | - | - | 2 Buah |  |
| 25 | Tempat Tidur Kayu | 3 | - | - | 3 Buah |  |
| 26 | Meja 1/2 Biro | 7 | - | - | 7 Buah |  |
| 27 | Meja Makan Besi | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 28 | Kursi Rapat | 82 | - | - | 82 Buah |  |
| 29 | Kursi Tamu | 3 | - | 2 | 5 Set |  |
| 30 | Kursi Biasa | 2 | - | - | 2 Buah |  |
| 31 | Bangku Tunggu | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 32 | Meja Komputer | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 33 | Sofa | 1 | - | 1 | 2 Set |  |
| 34 | Mesin Pemotong Rumput | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 35 | Lemari Es | 1 | - | - | 1 Buah |  |
| 36 | Kipas Angin | 8 | - | - | 8 Buah |  |
| 37 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | - | - | 1 Buah |  |
| 38 | Radio | - | 1 | - | 1 Buah |  |
| 39 | Televisi | 1 | - | 2 | 3 Buah |  |
| 40 | Loudspeaker | - | - | 4 | 4 Buah |  |
| 41 | Sound System | - | - | 1 | 1 Set |  |
| 42 | Karpet | - | - | 2 | 2 Buah |  |
| 43 | Lap Top | 4 | - | 5 | 9 Unit |  |
| 44 | P.C Unit | - | - | 2 | 2 Unit |  |
| 45 | Unit Tranceiver Ssb Portable | - | - | 1 | 1 Buah |  |
| 46 | Camera Electronic | - | - | 3 | 3 Buah |  |
| 47 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 2 | - | - | 2 Buah |  |

Dilihat dari tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa inventaris yang dimiliki oleh Kecamatan Pasimarannu sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai Kecamatan Pasimarannu.

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimarannu | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Kecamatan Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Pasimarannu |  |  |  | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 14 | 11 | 12 | 13 | 67,85% | 48,27% | 37,93% | 41,37% | 44,82% |
| 2 | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pasimarannu |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimarannu |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Tabel 2.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasimarannu**

**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun** | | | | | **Realisasi Anggaran Pada Tahun** | | | | | **Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun** | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | Anggaran | Realisasi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (12) | (13) | (14) | (15) |  | (17) | (18) |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.532.000 | - | - | - |  | 6.827.000 | - | - | - |  | 90,63% | - | - | - |  | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA‑SKPD | 4.538.000 | 12.306.000 | 7.500.000 | 10.390.000 |  | 3.856.000 | 12.306.000 | 7.500.000 | 10.390.000 |  | 84,97% | 100% | 100% | 100% |  | 56,88% | 72,87% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA‑SKPD | 4.820.000 | 12.391.000 | 7.500.000 | 8.831.500 |  | 4.195.000 | 12.391.000 | 7.500.000 | 8.831.500 |  | 87,03% | 100% | 100% | 100% |  | 45,11% | 57,88% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.490.000 | - | - | - |  | 7.490.000 | - | - | - |  | 100% | - | - | - |  | - | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.206.050.000 | 997.453.000 | 924.021.200 | 1.137.050.340 |  | 824.682.454 | 938.961.284 | 883.571.916 | 1.081.420.815 |  | 68,37% | 94,13% | 95,62% | 95,10% |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.030.000 | 5.151.000 | - | - |  | 14.805.000 | 5.151.000 | - | - |  | 98,50% | 100% | - | - |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 9.122.000 | - | - | - |  | 7.247.000 | - | - | - |  | 79,44% | - | - | - |  |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 14.400.000 | 5.322.000 | 5.625.000 | 5.995.900 |  | 10.176.000 | 5.322.000 | 5.625.000 | 5.931.000 |  | 70,66% | 100% | 100% | 98,91% |  | -16,92% | -12,19% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000 | 168.683.000 | 91.524.000 | 32.287.900 |  | 15.000.000 | 168.683.000 | 91.524.000 | 24.646.000 |  | 100% | 100% | 100% | 76,33% |  | 228,52% | 226,43% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.500.000 | 4.407.400 | 5.145.000 | 8.685.500 |  | 1.825.000 | 4.407.400 | 5.145.000 | 3.958.700 |  | 73% | 100% | 100% | 45,57% |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‑undangan | 5.000.000 | 7.080.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |  | 5.000.000 | 7.080.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 133.320.000- | 248.228.000 | 115.999.000 | 126.399.000 |  | 129.945.000 | 248.228.000 | 115.999.000 | 125.516.000 |  | 97,46% | 100% | 100% | 99,30% |  |  |  |
| Pengadaan Mebel | 35.740.000 | - | - | - |  | 35.740.000 | - | - | - |  | 100% | - | - | - |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13.368.000 | 16.302.000 | 7.882.800 | 7.200.000 |  | 13.368.000 | 16.302.000 | 7.882.800 | 6.066.500 |  | 100% | 100% | 100% | 84,25 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.000.000- | - | - | - |  | 320.000 | - | - | - |  | 2,66% | - | - | - |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 138.592.000 | 104.992.000 | 105.792.000 | 81.403.200 |  | 138.592.000 | 104.992.000 | 105.792.000 | 81.403.200 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.000.000 | 10.010.000 | - | 54.430.000 |  | 14.813.000 | 10.010.000 | - | 49.504.100 |  | 98,75% | 100% | - | 90,95% |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.400.000 | 3.100.000 | 35.830.000 | - |  | 12.230.000 | 3.100.000 | 35.830.000 | - |  | 84,93% | 100% | 100% | - |  | 325,77% | 327,05% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 44.650.000 | - | 26.576.000 |  | 9.900.000 | 44.650.000 | - | 26.576.000 |  | 99% | 100% | - | 100% |  | 153,01% | 155,27% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 29.063.000 | 35.794.000 | 10.370.000 | 31.145.800 |  | 28.633.000 | 35.794.000 | 10.370.000 | 22.159.000 |  | 98,52% | 100% | 100% | 71,14% |  | 50,82% | 67,66% |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 95.426.000 | 149.209.000 | 57.156.000 | - |  | 83.343.000 | 149.209.000 | 39.280.000 | - |  | 87,33 | 100% | 68,72% | - |  | -2,66% | 2,68% |
| Peningkatan  Efektifitas  Kegiatan  Pemerintahan di  Tingkat  Kecamatan | - | - | - | 72.174.760 |  | - | - | - | 65.544.960 |  | - | - | - | 90,81% |  | - | - |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\*\*\*\*\*\*) | 40.022.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 22.000.000 |  | 17.172.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 21.660.000 |  | 42,90% | 100% | 100% | 98,45 |  | 10,77% | 61,41% |

Dari tabel 2.5 di atas dengan melihat target Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya dan pencapian selama 5 (lima) tahun sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu sudah cukup optimal. Dengan melihat trend tersebut, dapat dibuat suatu perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang agar pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu lebih optimal.

Dan berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari fluktuatifnya anggaran yang tersedia dengan realisasi dari anggaran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Pasimarannu adalah ada beberapa program yang tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sumberdaya yang handal di bidang keuangan.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar boleh dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan instansi teknis dalam hal fasilitasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasimarannu. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana termasuk kegiatan non fisik yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Pasimarannu adalah minimnya sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan publik.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi guna meningkatkan sumberdaya manusia serta meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata di segala lapisan masyarakat.

* 1. **Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pasimarannu**

Tugas pokok SKPD Kecamatan Pasimarannu yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Pasimarannu, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menajring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
4. Aparat desa di wilayah Kecamatan Pasimarannu.
5. Seluruh masyarakat Kecamatan Pasimarannu dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.
   1. **Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

Kecamatan Pasimarannu yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 2 (dua) desa yang terletak di 1 (satu) pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima.

**Tabel 2.7**

Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimarannu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan Kecamatan Pasimarannu | Interperstasi : Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor penentu keberhasilan |
| 1. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Pasimarannu |  | Infrastruktur kelistrikan yang belum memadai | Pembangunan infrastruktur kelistrikan (PLN) |
|  |  |  | Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana | Pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dan siap digunakan setiap saat |
|  |  |  | Terbatasnya SDM dari segi kuantitas dan kualitas | Penambahan SDM yang berkualitas |
| 2. | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pasimarannu |  | Rendahnya tingkat kemandirian masyarakat | Kemandirian masyarakat perlu ditingkatkan dengan perbanyak sosialisasi |
|  |  |  | Kurangnya bimbingan/pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat | Melakukan pelatihan pemberdayaan secara terus menerus |
| 3. | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimarannu |  | Rendahnya kesadaran masyarakat | Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Isu Strategis Kecamatan Pasimarannu**

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan – perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu – isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance and Clean Government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi wilayah yang berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan pangan
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

**Tabel 2.8**

Isu Strategis Kecamatan Pasimarannu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Pasimarannu | Permasalahan Kecamatan Pasimarannu | Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Pasimarannu | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Pasimarannu | | | Isu strategis Kecamatan Pasimarannu |
| Global | Nasional | Regional |
| Sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata | Kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada | Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan | Hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam | Deforestasi dan perambahan hutan, perdagangan illegal satwa liar | Degradasi lahan | Pengembangan potensi wilayah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan pangan, pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif, Peningkatan keamanan dan ketertiban umum |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

* 1. **Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuannya adalah ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik***”, dengan indikator *Persentase Kepuasan Masyarakat*.

* 1. **Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029**

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pasimarannu dalam mencapai tujuannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dengan indikator *persentase peningkatan kepercayaan masyarakat*
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator persentase *masyarakat desa yang diberdayakan*
3. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan dengan indikator *persentase peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan*
4. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dengan indikator *persentase peningkatan kualitas pemerintahan desa*

Uraian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2025-2029, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n  NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Tahun | | | | | | Ket. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |  | Persentase kepuasan masyarakat | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 95% |  |
|  |  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 95% |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa | Persentase masyarakat desa yang diberdayakan | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 95% |  |
|  |  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatn | Persentase peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 95% |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pemerintahan desa | Persentase peningkatan kualitas pemerintahan desa | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 95% |  |

* 1. **Strategi Kecamatan Pasimarannu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029**

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Maju dan Sejahtera memerlukan strategi pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai Langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasimarannu selama kurun waktu 5 (lima) tahun adala*h “Meningkatkan dukungan program kelancaran pelayanan publik”.*

* 1. **Arah Kebijakan Kecamatan Pasimarannu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029**

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak dilingkungan Kantor Kecamatan Pasimarannu dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam Upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan Masyarakat (eksekutif dan legislative) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam Upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan dapat berupa ketetapan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Pasimarannu. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk lebih jelas kebijakan yang ditempuh Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kebijkan yang ditempuh Seksi Tata Pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi dilingkungan kecamatan.

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok Masyarakat

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah mendorong pengembangan sistem pemasaran dan pengawasan barang/jasa secara merata dan proporsional.

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah perlindungan dan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Masyarakat yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender.

Kebijakan rencana strategis menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pasimarannu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Kecamatan Pasimarannu tahun 2026-2029 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pasimarannu | Keterangan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Penyediaan sumber daya, pelatihan dan sosialisasi | Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |  |

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Uraian Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBD.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**4.2. Uraian Kegiatan**

Adapun uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pasimarannu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Pasimarannu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Keterangan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |  |  |  | *Persentase kepuasan masyarakat* |  |  |
|  |  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan |  |  | *Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat* |  |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD* | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | *Persentase Capaian Kinerja OPD* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD* |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  |
|  |  |  |  | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |
|  |  |  |  | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun | *Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  |
|  |  |  |  | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun | *Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |
|  |  |  |  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Mebel |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |
|  |  |  |  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |
|  |  |  |  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP* | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan | *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa |  |  | *Persentase masyarakat desa yang diberdayakan* |  |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan* | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |  |
|  |  |  |  |  | *Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan* |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |
|  |  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan |  |  | *Persentase peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan* |  |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk* | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |
|  |  |  |  | Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |
|  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan | *Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Jumlah Konflik Berlatar Belakang Sosial dan Keagamaan di Wilayah Kecamatan* | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  |
|  |  |  |  | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pemerintahan desa |  |  | *Persentase peningkatan kualitas pemerintahan desa* |  |  |
|  |  |  | Dana yang dibutuhkan |  | *Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah* | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |
|  |  |  |  | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | *Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  |

**4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

**Tabel 4.2**

**Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output | Indikator Outcome/Output | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Ket. |
| 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| **KECAMATAN PASIMARANNU** |  | **1.627.449.900** |  | **2.073.019.600** |  | **2.146.972.400** |  | **2.235.217.000** |  | **2.323.461.600** |  | **2.414.506.200** |  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian realisasi capaian anggaran OPD* | 1.502.129.340 | 100 | 1.721.639.700 | 100 | 1.778.772.400 | 100 | 1.851.317.000 | 100 | 1.923.861.600 | 100 | 1.997.206.200 |  |
|  | *Persentase capaian kinerja OPD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 19.221.500 |  | 29.865.000 |  | 30.000.000 |  | 31.500.000 |  | 33.000.000 |  | 36.000.000 |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun* | - | 3 | 9.955.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD* | 10.390.000 | 3 | 9.955.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD* | 8.831.500 | 3 | 9.955.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 1.137.050.340 |  | 1.171.635.800 |  | 1.210.000.000 |  | 1.260.500.000 |  | 1.311.000.000 |  | 1.362.000.000 |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 1.137.050.340 | 12 | 1.161.680.800 | 12 | 1.200.000.000 | 12 | 1.250.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | 12 | 1.350.000.000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | - | 3 | 9.955.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | 5.995.900 |  | 7.820.900 |  | 8.000.000 |  | 8.500.000 |  | 9.000.000 |  | 9.500.000 |  |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Tersusun* | 5.995.900 | 4 | 7.820.900 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.500.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.500.000 |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 170.252.400 |  | 306.325.200 |  | 318.910.000 |  | 331.025.000 |  | 343.140.000 |  | 355.255.000 |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 32.287.900 | 7 | 57.122.700 | 7 | 60.000.000 | 7 | 62.000.000 | 7 | 64.000.000 | 7 | 66.000.000 |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 8.685.500 | 2 | 9.407.500 | 2 | 9.500.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.500.000 | 2 | 11.000.000 |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 2.880.000 | 24 | 4.380.000 | 25 | 4.620.000 | 26 | 4.860.000 | 27 | 5.100.000 | 28 | 5.340.000 |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan* | 126.399.000 | 99 | 235.415.000 | 104 | 244.790.000 | 109 | 254.165.000 | 114 | 263.540.000 | 119 | 272.915.000 |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - |  | 80.000.000 |  | 80.000.000 |  | 80.000.000 |  | 80.000.000 |  | 80.000.000 |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 |  |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | - | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | - | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 88.603.200 |  | 91.492.800 |  | 95.862.400 |  | 101.792.000 |  | 107.721.600 |  | 112.451.200 |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 7.200.000 | 12 | 6.360.000 | 12 | 7.000.0000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 10.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 81.403.200 | 12 | 85.132.800 | 12 | 88.862.400 | 12 | 93.792.000 | 12 | 98.721.600 | 12 | 102.451.200 |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 81.006.000 |  | 34.500.000 |  | 36.000.000 |  | 38.000.000 |  | 40.000.000 |  | 42.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 54.430.000 | 7 | 14.500.000 | 7 | 15.000.000 | 7 | 16.000.000 | 7 | 17.000.000 | 7 | 18.000.000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 26.576.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.500.000 | 2 | 16.000.000 | 2 | 16.500.000 | 2 | 17.000.000 |  |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | - | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 |  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | *Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP* | 72.174.760 | 100 | 47.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 53.000.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 59.000.000 |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | 72.174.760 |  | 35.000.000 |  | 37.000.000 |  | 39.000.000 |  | 41.000.000 |  | 43.000.000 |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan* | 72.174.760 | 2 | 35.000.000 | 2 | 37.000.000 | 2 | 39.000.000 | 2 | 41.000.000 | 2 | 43.000.000 |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | - |  | 12.000.000 |  | 13.000.000 |  | 14.000.000 |  | 15.000.000 |  | 16.000.000 |  |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan* | - | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.000.000 |  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | *Persentase partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan* | 31.145.800 | 77 | 180.879.900 | 77,77 | 186.000.000 | 88,00 | 192.000.000 | 88,88 | 198.000.000 | 88,88 | 204.000.000 |  |
|  | *Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif* |  | 91,35 |  | 91,50 |  | 91,75 |  | 92 |  | 92,10 |  |  |
|  | *Persentase Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu* |  | 67,30 |  | 70,60 |  | 72,50 |  | 75,40 |  | 79,20 |  |  |
|  | *Persentase Masyarakat/kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan* |  | 3,50 |  | 3,80 |  | 4,20 |  | 4,55 |  | 4,96 |  |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | 31.145.800 |  | 180.879.900 |  | 186.000.000 |  | 192.000.000 |  | 198.000.000 |  | 204.000.000 |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | 31.145.800 | 8 | 30.375.000 | 8 | 31.000.000 | 8 | 32.000.000 | 8 | 33.000.000 | 8 | 34.000.000 |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan* | - | 7 | 150.504.900 | 7 | 155.000.000 | 7 | 160.000.000 | 7 | 165.000.000 | 7 | 170.000.000 |  |
| Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk* | 22.000.000 | 0,9 | 19.500.000 | 0,8 | 21.000.000 | 0,7 | 22.500.000 | 0,6 | 24.000.000 | 0,5 | 25.500.000 |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | 22.000.000 |  | 12.000.000 |  | 13.000.000 |  | 14.000.000 |  | 15.000.000 |  | 16.000.000 |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan* | 22.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 14.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 16.000.000 |  |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | - |  | 7.500.000 |  | 8.000.000 |  | 8.500.000 |  | 9.000.000 |  | 9.500.000 |  |
| Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | - | 4 | 7.500.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.500.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.500.000 |  |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | *Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan* | - | 8 | 80.000.000 | 7 | 86.000.000 | 6 | 90.000.000 | 5 | 94.000.000 | 4 | 100.000.000 |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | - |  | 80.000.000 |  | 86.000.000 |  | 90.000.000 |  | 94.000.000 |  | 100.000.000 |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Dilaksanakan* | - | 2 | 40.0000.000 | 2 | 43.0000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 47.000.000 | 2 | 50.000.000 |  |
| Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yang Dilaksanakan* | - | 2 | 40.0000.000 | 2 | 43.0000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 47.000.000 | 2 | 50.000.000 |  |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah* | - | 34,75 | 24.000.000 | 35,00 | 25.200.000 | 35,26 | 26.400.000 | 36,70 | 27.600.000 | 37,20 | 28.800.000 |  |
| Dana yang dibutuhkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - |  | 24.000.000 |  | 25.200.000 |  | 26.400.000 |  | 27.600.000 |  | 28.800.000 |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Dilaksanakan* | - | 20 | 12.000.000 | 21 | 12.600.000 | 22 | 13.200.000 | 23 | 13.800.000 | 24 | 14.400.000 |  |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | - | 20 | 12.000.000 | 21 | 12.600.000 | 22 | 13.200.000 | 23 | 13.800.000 | 24 | 14.400.000 |  |

**4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 didukung dengan 17 (tujuh belas) program prioritas. Didalam mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Pasimarannu akan melaksanakan subkegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Membangun Desa, Menata Kota”
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Membangun Desa, Menata Kota”
3. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Membangun Desa, Menata Kota”
4. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah”
5. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan”
6. Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan”
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum”
8. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan untuk mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar “Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum”

**Tabel 4.3**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program Prioritas** | **Outcome** | **Kegiatan/Subkegiatan** | **Keterangan** |
| 1. | Membangun desa, menata kota | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa |  |
|  |  |  | Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa |  |
|  |  | *Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  |
|  |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  |
| 2. | Kemandirian pangan |  |  |  |
| 3. | Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS |  |  |  |
| 4. | Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT |  |  |  |
| 5. | Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas |  |  |  |
| 6. | Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH |  |  |  |
| 7. | Pengentasan kemiskinan |  |  |  |
| 8. | Penguatan fiskal daerah |  |  |  |
| 9. | Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa |  |
|  |  |  | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan |  |
| 10. | Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM |  |  |  |
| 11. | Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan  lokal |  |  |  |
| 12. | Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan  UMKM |  |  |  |
| 13. | Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan |  |  |  |
| 14. | Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran  kebangsaan | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |
|  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |
|  |  |  | Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |  |
| 15. | Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum |  |
|  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan |  |
|  |  | *Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah |  |
|  |  |  | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |
| 16. | Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga |  |  |  |
| 17. | Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan |  |  |  |

**4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimarannu**

**Tabel 4.4**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimarannu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |
| 2. | Persentase Masyarakat desa yang diberdayakan | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| 3. | Persentase peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan | % | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  |
| 4. | Persentase peningkatan kualitas pemerintahan desa | % | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |  |

**4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKK)**

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pasimarannu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Persentase capaian realisasi anggaran OPD | % | 94 | 94,5 | 96 | 96 | 98 | 98 |  |
| 2. | Persentase capaian kinerja OPD | % | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |  |
| 3. | Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD | % | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 100 | 100 |  |
| 4. | Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |  |
| 5. | Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangunan | % | 77,77 | 77,77 | 88,89 | 88,89 | 100 | 100 |  |
| 6. | Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk | Angka (perseribu satuan penduduk) | 4,52 | 4,34 | 4,07 | 3,80 | 3,62 | 2,71 |  |
| 7. | Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan | kali | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  |
| 8. | Persentase desa yang menyelesaikan peraturan desa tepat waktu | % | 62,5 | 62,5 | 75 | 87,5 | 87,5 | 100 |  |

**BAB V**

**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasimarannu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasimarannu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan dalam kurung waktu tahun 2025 – 2029.

Visi Kecamatan Pasimarannu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2029, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasimarannu. Rencana strategis Kecamatan Pasimarannu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaan Renstra Kecamatan Pasimarannu periode 2025 – 2029 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2029. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2025 – 2029 adalah Camat Pasimarannu yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPERIDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2025 – 2029.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepualauan Selayar sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasimarannu

Pasimarannu, 2025

**CAMAT PASIMARANNU**,

**SYAMSIL, S.Sos**

Nip. 19680204 198903 1 009